

## **Strategi Peningkatan Kinerja Operator Desa dalam Penyaluran Bantuan Sosial di Wilayah Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara**

**Tatik Marwati<sup>1</sup>, Mamik Indaryani<sup>2</sup>, Joko Utomo<sup>3</sup>**

Universitas Muria Kudus

tatikmarwati@gmail.com

### **ABSTRACT**

*This study aims to describe the strategy for improving the performance of village operators in distributing social assistance in the Kalinyamatan District, Jepara Regency. This research method uses Qualitative Methodology with a descriptive approach by conducting interviews with 12 informants including village heads, village operators and beneficiary families. The results of this study state that the main duties and functions of village operators in the Kalinyamatan District, Jepara Regency in distributing social assistance are focused on data management to ensure it is on target. The process of inputting social assistance data to KPM in the Kalinyamatan District, Jepara Regency is carried out in stages through the integrated SIKS-NG system managed by the Ministry of Social Affairs. The results of the identification of internal and external factors of village operators in distributing social assistance in the Kalinyamatan District, Jepara Regency using SWOT analysis can optimize efficiency, data validity, and accuracy of social assistance targets. The strategy for improving the performance of village operators in the Kalinyamatan District, Jepara Regency is focused on strengthening technical capacity, updating data, and increasing transparency.*

**Keyword: Village Operator Performance, Distribution of Social Assistance**

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan strategi peningkatan kinerja operator desa dalam penyaluran bantuan sosial di wilayah Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara. Metode penelitian ini menggunakan Metodologi Kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan mealukan wawancara kepada 12 informan yang meliputi kepala desa, operator desa dan keluarga penerima manfaat. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa tugas pokok dan fungsi operator desa di wilayah Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara dalam penyaluran bantuan sosial difokuskan pada pengelolaan data agar tepat sasaran. Proses input data bantuan sosial kepada KPM di wilayah Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara dilakukan secara berjenjang melalui sistem terpadu SIKS-NG yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Hasil identifikasi faktor internal dan eksternal operator desa dalam penyaluran bantuan sosial di wilayah Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara menggunakan analisis SWOT dapat mengoptimalkan efisiensi, validitas data, dan ketepatan sasaran bantuan sosial. Strategi peningkatan kinerja operator desa di wilayah Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara difokuskan pada penguatan kapasitas teknis, pemutakhiran data, serta peningkatan transparansi.

**Kata kunci: Kinerja Operator Desa, Penyaluran Bantuan Sosial**

## **PENDAHULUAN**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjadi landasan hukum nasional yang mendasari kinerja operator desa. Peraturan ini mencakup penunjukan operator sebagai staf desa untuk membantu kelancaran administrasi, pengoperasian sistem informasi desa, dan tugas lainnya sesuai kebutuhan desa. Salah satu tujuan pemerintah desa yaitu mengurangi kesenjangan sosial dan menanggulangi kemiskinan. Oleh karena itu pemerintah desa berperan penting dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk memastikan bantuan sampai kepada yang berhak. Pemerintah desa juga bertanggung jawab atas administrasi, verifikasi data, sosialisasi program, distribusi bantuan, dan pelaporan. Pemerintah desa bertindak sebagai fasilitator, komunikator, dan pengawas untuk kelancaran penyaluran bantuan agar tepat sasaran dan efektif.

Kecamatan Kalinyamatan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Jepara yang memiliki 12 Desa/Kelurahan yang meliputi: Desa Bakalan, Desa Bandungrejo, Desa Banyuputih, Desa Batukali, Desa Damarjati, Desa Kriyan, Desa Manyargading, Desa Margoyoso, Desa Pendosawalan, Desa Purwogondo, Desa Robayan, Desa Sendang. Visi Kecamatan Kalinyamat yaitu Mewujudkan Jepara Madani Yang Berkarakter, Maju Dan Berdaya Saing. Salah satu misi Kecamatan Kalinyamatan yang perlu dipertimbangkan yaitu Mewujudkan Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan. Misi tersebut menguraikan bahwa meningkatkan pembangunan daerah dan desa; mengurangi kesenjangan sosial, keberpihakan kepada masyarakat dan kaum lemah, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran, menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap pelayanan sosial serta sarana prasarana ekonomi.

Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jepara mengatur lebih rinci tentang pengangkatan, pemberhentian, tugas, dan fungsi Perangkat Desa dalam Perda No. 3 Tahun 2021 dan Perbup No. 36 Tahun 2016 yang menjelaskan bahwa jabatan operator desa umumnya bukan posisi struktural yang berdiri sendiri dalam struktur organisasi desa, melainkan sebuah penugasan fungsional atau staf administrasi kepada salah satu perangkat desa atau petugas yang ditunjuk melalui Keputusan Kepala Desa/Petinggi. Surat Keputusan (SK) Kepala Desa/Petinggi dalam menanggulangi kemiskinan merupakan instrumen hukum desa yang digunakan untuk melegitimasi kebijakan dan program spesifik di tingkat desa yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan di wilayah desa. Surat Keputusan (SK) Kepala Desa/Petinggi dalam menanggulangi kemiskinan berfokus pada pembentukan tim koordinasi atau penetapan data penerima bantuan.

Surat Keputusan (SK) Kepala Desa/Petinggi dalam menanggulangi kemiskinan memiliki tujuan utama sebagai landasan hukum dan operasional untuk memastikan program penanggulangan kemiskinan di tingkat desa berjalan secara efektif, tepat sasaran, dan akuntabel. Berkaitan dengan pengentasan kemiskinan di wilayah Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara, Petinggi Desa Purwogondo dalam rangka usaha menanggulangi kemiskinan di Desa Purwogondo, perlu upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang harus didukung dengan

koordinasi yang baik antar unsur-unsur terkait menerbitkan Surat Keputusan Petinggi Purwogondo Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPKD) di Desa Puwogondo Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara.

Hasil sanding data selama Triwulan 1 dan Triwulan 2 tahun 2025 mengalami pengurangan karena terdapat beberapa perubahan status ekonomi dari pihak KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Hal ini disebabkan karena terdapat beberapa KPM (Keluarga Penerima Manfaat) telah masuk dalam kategori Desil 5 (Pas-pasan) dan Desil 6-10 (Menengah ke atas) pemadanan data DTSEN 2025, KPM (Keluarga Penerima Manfaat) tidak memenuhi komponen PKH, KPM (Keluarga Penerima Manfaat) terindikasi penerima Upah Minimum Provinsi (UMP). Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan utama penyaluran bansos sering kali tidak diperbarui secara berkala, sehingga data KPM tidak valid atau tidak mutakhir. Akibatnya, banyak KPM yang sudah sejahtera, meninggal dunia, atau pindah domisili, namun namanya masih tercantum sebagai penerima. Selain itu kurangnya sinkronisasi data dan koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga terkait membuat proses verifikasi data menjadi tidak optimal.

Mengingat kompleksitas persoalan ini dan dampak signifikannya terhadap kinerja operator desa, penelitian ini menjadi relevan dan mendesak dengan mengambil lokasi di Wilayah Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara, sehingga peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian yang berjudul "**Strategi Peningkatan Kinerja Operator Desa Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Di Wilayah Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara**".

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini bertujuan menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam menentukan strategi peningkatan kinerja operator desa dalam penyaluran bantuan di wilayah Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara. Metode penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling, yaitu memilih informan berdasarkan kriteria atau tujuan penelitian yang spesifik, karena informan dianggap paling tahu atau relevan dengan topik yang diteliti. Informan dalam penelitian ini sebanyak 12 informan yang terdiri dari 4 kepala desa di wilayah Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara, 4 operator desa di wilayah Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara dan 4 KPM (Keluarga Penerima Manfaat) di wilayah Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Analisis SWOT Aspek SDM**

#### **a. Kekuatan (Strengths)-Internal SDM**

1. Kedekatan Geografis dan Sosial: Operator desa dan perangkat desa umumnya merupakan warga setempat, sehingga memiliki pengetahuan mendalam

mengenai kondisi ekonomi warga yang sebenarnya (lebih memahami siapa yang layak menerima bansos).

2. Penguasaan Sistem: Sebagian operator desa sudah dibekali kemampuan teknis dalam mengoperasikan SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation) dan aplikasi DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional).
  3. Keberadaan Struktur Organisasi: Adanya perangkat desa yang terstruktur mempermudah pembagian tugas dalam verifikasi dan validasi data calon penerima.
  4. Komitmen Melayani: Motivasi untuk membantu warga desa sendiri seringkali menjadi pendorong utama kinerja meskipun dihadapkan pada tugas yang padat.
- b. Kelemahan (Weaknesses)-Internal SDM
1. Kapasitas Teknis/IT Terbatas: Kualitas SDM belum merata, masih banyak operator desa yang kesulitan mengoperasikan aplikasi berbasis digital secara optimal, menyebabkan keterlambatan pemutakhiran data.
  2. Beban Kerja Ganda: Operator desa seringkali merangkap jabatan (mengurus administrasi desa, keuangan, sekaligus bansos), sehingga fokus terbagi dan penyaluran menjadi tidak maksimal.
  3. Kerentanan Data (Human Error): Masih ditemukan kesalahan input data (data ganda, NIK tidak valid, atau ketidaksesuaian data dengan kondisi riil).
  4. Rendahnya Insentif/Gaji: Operator desa seringkali mendapatkan honorarium yang rendah, yang dapat memengaruhi motivasi dan kinerja dalam menangani data yang sensitif.
- c. Peluang (Opportunities)-Eksternal SDM
1. Pelatihan dan Pendampingan: Adanya dukungan dari Dinas Sosial Kabupaten/Kecamatan untuk melakukan peningkatan kapasitas (pelatihan SIKS-NG) bagi operator desa.
  2. Pemanfaatan Teknologi: Digitalisasi pemerintah desa (digital desa) memudahkan sinkronisasi data dengan basis data pusat, jika dimanfaatkan dengan baik oleh SDM yang kompeten.
  3. Kebijakan Validasi Berjenjang: Kebijakan pemerintah pusat yang mengharuskan verifikasi berlapis memaksa perbaikan sistem kerja dan akurasi data di tingkat desa.
  4. Partisipasi Masyarakat: Pelibatan masyarakat/RT/RW dalam musyawarah desa (Musdes) untuk validasi data dapat mengurangi beban operator dalam memastikan kelayakan penerima.
- d. Ancaman (Threats)-Eksternal SDM
1. Tekanan Sosial dan Kekeluargaan: Operator desa sering mendapat intimidasi atau tekanan dari pihak tertentu (termasuk oknum warga atau tokoh desa) untuk memasukkan data yang tidak layak ke dalam DTSEN.
  2. Perubahan Aturan yang Cepat: Perubahan kebijakan penyaluran bansos dari pusat yang sangat cepat menuntut adaptasi tinggi, yang seringkali belum diimbangi dengan pemahaman SDM desa.

3. Data Kependudukan Tidak Update: Ketergantungan pada data Dukcapil yang seringkali berbeda dengan kondisi di lapangan (contoh: warga meninggal, pindah, atau sudah kaya namun masih terdata miskin).
4. Potensi Penyalahgunaan: Adanya risiko penyalahgunaan wewenang (oknum perangkat desa) jika pengawasan kurang, mengakibatkan bansos salah sasaran.

## **Hasil Analisis SWOT Aspek Kompetensi**

### **a. Kekuatan (Strengths)-Internal Kompetensi**

1. Kedekatan Geografis dan Sosial: Operator desa lebih mengenal karakteristik dan kondisi ekonomi warga secara langsung, sehingga mempermudah verifikasi data riil di lapangan.
2. Pemahaman Wilayah: Memiliki pemahaman mendalam tentang siapa yang paling layak menerima bantuan, mengurangi risiko salah sasaran jika didasarkan pada objektivitas.
3. Akses Data Dasar: Memiliki akses langsung ke dokumen kependudukan (KK/KTP) warga dan data DTSEN (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).
4. Responsif: Aparat desa lebih cepat merespons keluhan warga terkait keterlambatan atau kesalahan penyaluran bantuan.

### **b. Kelemahan (Weaknesses)-Internal Kompetensi**

1. Kompetensi Digital Rendah: Masih terdapat operator desa yang kurang memahami teknologi dalam mengoperasikan aplikasi verifikasi/update data (seperti SIKS-NG).
2. Pemutakhiran Data Lambat: Sering terjadi ketidaksesuaian data (data ganda, warga meninggal, atau pindah) yang tidak langsung diperbarui (updated).
3. Kurangnya Pemahaman Regulasi: Operator terkadang kurang memahami petunjuk teknis (juknis) terbaru dari pemerintah pusat, menyebabkan kesalahan administratif.
4. Beban Kerja Ganda: Operator sering kali merangkap tugas, sehingga fokus dalam penyaluran bansos terbagi.

### **c. Peluang (Opportunities)-Eksternal Kompetensi**

1. Digitalisasi Desa: Program DTSEN dan SIKS-NG memudahkan operator dalam pemutakhiran data secara online dan realtime.
2. Pelatihan dan Pendampingan: Adanya bimbingan teknis (Bimtek) dari dinas sosial kabupaten/kecamatan untuk meningkatkan kemampuan teknis operator.
3. Partisipasi Warga: Adanya mekanisme Musyawarah Desa (Musdes) untuk memvalidasi data penerima agar lebih transparan.
4. Dukungan Pendamping Sosial: Bantuan dari pendamping PKH/BLT-DD yang mempermudah operator dalam pelaporan.

### **d. Ancaman (Threats)-Eksternal Kompetensi**

1. Konflik Sosial: Ketidakpuasan warga yang tidak menerima bantuan dapat memicu konflik langsung kepada pemerintah desa.
2. Intervensi/Tekanan Sosial: Adanya tekanan dari oknum tokoh masyarakat atau keluarga aparat untuk memasukkan data yang tidak layak.

3. Validitas Data Eksternal: Data dari pusat terkadang tidak sinkron dengan kondisi riil di lapangan, menyebabkan kebingungan.
4. Infrastruktur Internet: Jaringan internet yang tidak stabil yang dimiliki desa menghambat proses upload data ke sistem pusat.

## **Hasil Analisis SWOT Aspek Fasilitas**

### **a. Kekuatan (Strengths)-Internal Fasilitas**

1. Keberadaan Kantor Desa sebagai Pusat Data: Kantor desa menyediakan ruang fisik untuk pengarsipan dan pusat koordinasi DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional).
2. Adanya Perangkat Penunjang Kinerja (Komputer/Laptop): Tersedianya komputer di kantor desa memudahkan operator dalam menginput data ke aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation).
3. Akses Jaringan Internet Desa: Fasilitas internet yang sudah masuk ke kantor desa mempermudah pelaporan real-time secara online.
4. Aksesibilitas Lokasi: Lokasi kantor desa yang mudah dijangkau oleh warga memudahkan proses verifikasi dan penyaluran bantuan sosial secara langsung.

### **b. Kelemahan (Weaknesses)-Internal Fasilitas**

1. Infrastruktur Teknologi Terbatas/Usang: Komputer yang dimiliki desa seringkali spesifikasinya rendah atau jumlahnya terbatas, sehingga menghambat kecepatan input data.
2. Koneksi Internet Tidak Stabil: Di beberapa desa, akses internet masih lemah atau tidak stabil saat melakukan verifikasi maupun pengusulan, menyebabkan keterlambatan sinkronisasi data SIKS-NG.
3. Kurangnya Fasilitas Pengamanan Data: Minimnya penyimpanan arsip fisik yang aman berisiko kehilangan data penerima bansos.

### **c. Peluang (Opportunities)-Eksternal Fasilitas**

1. Program Smart Village/Desa Digital: Kebijakan pemerintah pusat/daerah untuk digitalisasi desa memberikan kesempatan peningkatan sarana teknologi (komputer dan internet).
2. Anggaran Dana Desa: Adanya kebijakan penggunaan dana desa untuk operasional pelayanan publik dan perbaikan sarana kantor desa.
3. Pelatihan Pengelolaan Aplikasi: Pelatihan dari pemerintah kabupaten bagi operator untuk optimalisasi aplikasi SIKS-NG dan sistem informasi lainnya.
4. Kerjasama (CSR): Kesempatan memperoleh bantuan fasilitas dari sektor swasta (Corporate Social Responsibility) untuk penguatan jaringan atau komputer.

### **d. Ancaman (Threats)-Eksternal Fasilitas**

1. Validitas Data (Ketidaksesuaian Data): Masyarakat memberikan informasi yang tidak akurat, membuat data yang diinput ke aplikasi menjadi tidak valid meskipun fasilitas teknologi sudah ada.
2. Perubahan Sistem/Aplikasi yang Cepat: Perubahan aturan atau sistem aplikasi bansos secara mendadak yang memerlukan peningkatan fasilitas (spesifikasi komputer/internet) yang tidak sempat dikejar oleh desa.

3. Faktor Geografis/Cuaca: Kondisi geografis yang menyulitkan distribusi bantuan sosial, terutama saat terjadi bencana, meskipun fasilitas kantor desa memadai.
4. Tekanan Sosial: Intervensi atau ketidakpuasan warga terkait data penerima, yang dapat menghambat kinerja operasional operator di lapangan.

## **Hasil Analisis SWOT Aspek Database**

### **a. Kekuatan (Strengths)-Internal Database**

1. Akses Langsung ke Data Warga (Basis Data Desa): Operator desa memiliki data riil kependudukan, memahami kondisi sosial ekonomi warga secara langsung, dan memiliki akses terhadap musyawarah desa (Musdes) untuk validasi.
2. Penguasaan Aplikasi SIKS-NG: Operator desa dilatih untuk menggunakan aplikasi pengusulan bansos seperti SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation) untuk memperbarui data penerima.
3. Kedekatan Geografis: Operator berada di lokasi, memudahkan verifikasi lapangan dan respon cepat terhadap perubahan status warga (meninggal, pindah, atau graduasi mandiri).

### **b. Kelemahan (Weaknesses)-Internal Database**

1. Tingginya Data Tidak Akurat (Mis-data): Masih sering terjadi temuan data ganda, NIK tidak padan dengan Dukcapil, atau penerima sudah tidak layak (graduasi) tapi masih terdaftar.
2. Kapasitas SDM dan Infrastruktur: Terbatasnya kemampuan teknis sebagian operator dalam mengoperasikan sistem digital, serta jaringan internet di desa yang tidak stabil.
3. Kesenjangan Verifikasi (Lambatnya Updating Data): Pemutakhiran data (update) sering terlambat dibandingkan dengan kecepatan penyaluran bantuan, mengakibatkan data outdated.
4. Beban Kerja Ganda: Operator seringkali merangkap tugas lain, sehingga fokus pada pemutakhiran DTSEN terpecah.

### **c. Peluang (Opportunities)-Eksternal Database**

1. Digitalisasi DTSEN oleh Kemensos: Adanya perbaikan sistem dari Kemensos yang mewajibkan sinkronisasi dengan Dukcapil memberikan peluang data lebih akurat.
2. Kebijakan Musdes untuk Validasi: Peluang untuk memutakhirkan data secara transparan melalui forum resmi desa (Musdes) agar bansos tepat sasaran.
3. Peningkatan Kapasitas dari Dinsos: Adanya pelatihan dan bimbingan teknis berkala dari Dinas Sosial kabupaten kepada operator desa terkait penempatan database.

### **d. Ancaman (Threats)-Eksternal Database**

1. Tingginya Konflik Sosial (Polemik): Data bansos yang tidak akurat memicu kecemburuan sosial dan polemik di tingkat desa.
2. Perubahan Aturan yang Cepat: Perubahan kriteria penerima bantuan dari pusat yang seringkali mendadak, menyulitkan operator dalam penyesuaian data.

3. Intervensi atau Tekanan Lokal: Adanya tekanan dari pihak tertentu di desa untuk memasukkan nama yang tidak berhak (non-basis data) ke dalam DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional).

## Pembahasan

### 1. Tugas Pokok Dan Fungsi Operator Desa Dalam Penyaluran Bantuan Sosial

Operator desa memegang peranan krusial dalam proses penyaluran bantuan sosial di Wilayah Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara, khususnya dalam menjembatani data warga miskin dengan Kementerian Sosial melalui aplikasi SIKS-NG. Sebagai ujung tombak digitalisasi desa, operator desa di Wilayah Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara bertanggung jawab memastikan data yang digunakan akurat dan mutakhir. Dengan demikian, tugas pokok dan fungsi operator desa dituntut untuk melakukan pemrosesan data KPM secara cepat, akurat, dan transparan yang akan berdampak pada keberhasilan program penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran kepada KPM di Wilayah Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara.

Operator desa di Wilayah Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara memiliki tugas pokok dalam memastikan data penerima manfaat akurat, valid, dan update melalui sistem SIKS-NG (System Information Kesejahteraan Sosial-Next Generation) serta sistem DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional). Kedua sistem ini mengintegrasikan data sosial ekonomi seluruh penduduk Indonesia dari berbagai instansi pemerintah untuk mendukung perencanaan pembangunan dan penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran. Data ini mencakup informasi detail seperti kondisi sosial, ekonomi, hingga kepemilikan aset, yang dikelompokkan dalam 10 kategori kesejahteraan (desil) berdasarkan NIK. Operator desa di Wilayah Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara juga memiliki tugas mengeluarkan surat keterangan miskin atau surat keterangan domisili sebagai syarat administrasi pendukung. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan ODM yang menyatakan bahwa:

“setiap kali ada bantuan yang datang ke desa pertama-tama biasanya ada pemberitahuan sebelumnya satu minggu sebelumnya contoh misal ada bantuan pangan beras biasanya dari dinas mengirimkan BA lalu dari desa memverval satu-satu KPM”

Operator desa di Wilayah Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara memiliki fungsi yang menghubungkan data riil di lapangan (desa) dengan sistem pusat (Kementerian Sosial) melalui aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation). Operator desa di Wilayah Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara berperan sebagai perantara antara desa, kecamatan, Dinas Sosial Kabupaten, hingga Kementerian Sosial dalam memastikan data warga miskin di desa tersebut terinput, terupdate, dan valid di DTSEN serta melakukan *ground cek* dan melakukan verval kelayakan penerima bantuan dan pengusulan KPM baru. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan OPB yang menyatakan:

“untuk peran operator desa itu pertama proses pengusulan jadi masyarakat datang ke balai desa membawa berkas satu KK asli dan foto rumah depan dan setelah itu dari desa pengusulan melalui aplikasi SIKS-NG Kemensos”

Pemerintah desa tanpa operator desa yang baik dapat mengakibatkan data bantuan sosial akan tidak terarah, sehingga penyaluran bantuan sosial yang dilakukan tidak tepat sasaran. Langkah awal yang dilakukan operator desa Wilayah Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara dalam menilai kelayakan KPM yaitu dengan melakukan survei secara langsung ke rumah KPM. Hal ini sejalan dengan pernyataan KPM yang menyatakan bahwa:

“operator desa melakukan door to door untuk memverval KPM kita sengaja memang apa kemaren itu melihat dari operator desa itu blusukan ke warga-warga mengecek langsung”

Operator desa di Wilayah Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara memiliki wewenang dalam memasukkan data warga miskin baru yang masuk dalam Musyawarah Desa (Musdes) ke aplikasi SIKS-NG dengan melakukan *update* data secara berkala semisal terdapat KPM yang pindah domisili, KPM yang meninggal dan KPM yang sudah masuk kategori mampu (Desil 6 sampai 10) agar tidak terjadi salah sasaran.

## **2. Proses Input Data Bantuan Sosial Kepada Keluarga Penerima Manfaat**

Proses input data bantuan sosial kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) merupakan prosedur krusial yang dilakukan pemerintah untuk memastikan bantuan tepat sasaran, terintegrasi, dan akurat. Proses ini berpusat pada DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional) dan menggunakan aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation). Operator desa di Wilayah Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara dalam hal ini memegang penuh dalam verval data penerima PKH, BPNT, BLT Desa, dan bansos lainnya agar tepat sasaran dengan dasar aplikasi resmi pemerintah untuk pengusulan dan pengecekan bansos.

Operator desa di Wilayah Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara dalam proses penginputan data KPM dapat dilakukan dengan mendaftarkan diri ke RT/RW atau kantor kelurahan. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan OPB yang menyatakan bahwa:

“soal yang lansia-lansia gaptak niku nggeh sering tapi kita jadwal setiap tanggal 1 sampai tanggal 10 setiap bulannya ketika dia memang layak langsung kita eksekusi”

Data KPM tersebut kemudian dibahas dalam Musyawarah Desa (Musdes) untuk validasi awal sebelum diinput oleh operator SIKS-NG Desa. KPM juga bisa mengunduh aplikasi Cek Bansos Kemensos, membuat akun, dan menggunakan fitur Usul untuk mendaftarkan diri, keluarga, atau orang lain di wilayahnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan ODK yang menyatakan bahwa:

“ada beberapa masyarakat yang sudah tahu mengenai cek bansos lewat online dan sebagian sudah ada yang daftar”

Data KPM yang telah diinput Operator desa di Wilayah Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara akan diverifikasi usulan dari desa tersebut oleh Dinas Sosial Kabupaten Jepara dan Kementerian Sosial untuk melakukan pemadanan data (sinkronisasi) dengan data Dukcapil pusat. Proses verval ini membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 6 bulan tergantung kelengkapan yang sudah dipenuhi KPM dan jumlah antrian pengusulan. KPM yang tergolong pada kelompok desil 1-5 memiliki peluang terbesar menerima bantuan sosial. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan PDK yang menjelaskan bahwa:

“operator juga melihat itu benar atau tidak untuk perubahan desil tersebut karena e kami mengetahui untuk desil 1 sampai 5 itu yang bisa menerima manfaat dan mungkin dilihat dari kesenjangan ekonominya untuk melakukan perubahan desil”

Apabila pengusulan diterima sesuai dengan sistem STSEN dan verifikasi disahkan oleh kementerian sosial maka operator desa di Wilayah Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara menerbitkan berita acara dan undangan.

## **2.b Flow Chart Sinkronisasi Data Keluarga Penerima Manfaat**

Flowchart sinkronisasi data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) merupakan alur sistematis untuk memastikan data masyarakat di Wilayah Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara selaras dengan DTSEN. Proses ini sangat krusial agar bantuan sosial seperti PKH atau BPNT tepat sasaran. Berikut adalah tahapan utama dalam flow chart sinkronisasi data KPM berdasarkan mekanisme terbaru tahun 2026:

- a) Pengumpulan & Usulan Data (Tingkat Desa/Kelurahan): Warga melakukan pengusulan mandiri melalui Musyawarah Desa/Kelurahan atau melalui pengurus RT/RW. Operator Desa/Kelurahan menginput data usulan ke dalam sistem aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation).
- b) Verifikasi & Validasi (Tingkat Kabupaten/Kota): Dinas Sosial Kabupaten/Kota melakukan verifikasi administrasi dan pengecekan lapangan (ground check) untuk memastikan kelayakan penerima. Data disinkronkan dengan data kependudukan di Dukcapil untuk memastikan NIK dan nomor KK valid serta aktif.
- c) Sinkronisasi & Penetapan (Tingkat Pusat/Kemensos): Data yang telah diverifikasi daerah dikirim ke Kementerian Sosial. Pusat melakukan sinkronisasi akhir dengan basis data nasional (DTSEN) untuk menetapkan status KPM. Hasil verifikasi biasanya memakan waktu 1-3 bulan hingga penetapan Surat Keputusan (SK).
- d) Penerbitan Daftar Penerima (KPM Aktif): Nama-nama yang lolos sinkronisasi akan muncul di situs resmi Cek Bansos Kemensos atau DTSEN Kemensos untuk mengecek update status penyaluran.

Alur sinkronisasi data Keluarga Penerima Manfaat disajikan sebagai berikut:



### 3. Posisi Kinerja Operator Desa (IFAS) dalam Penyaluran Bantuan Sosial

Penyaluran bantuan sosial di Wilayah Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara melibatkan peran sentral operator desa (aparatur desa) yang bertanggung jawab atas pendataan, verifikasi, dan penyaluran langsung. Kinerja operator desa di Wilayah Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal yang dapat menentukan ketepatan sasaran dan kecepatan distribusi.

Faktor internal dalam penyaluran bantuan sosial di Wilayah Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara yang pertama terkait dengan pemahaman operasional yang rendah terhadap regulasi terbaru dari Kementerian Sosial. Kemampuan teknis operator dalam mengoperasikan sistem aplikasi SIKS-NG seringkali terbatas dalam menilai kondisi ekonomi KPM saat ini. Operator desa di Wilayah Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara juga dituntut untuk berlaku adil dan amanah dalam verifikasi dan validasi data untuk mencegah data ganda atau data fiktif. Oleh karena itu diperlukan adanya koordinasi operator desa dengan pihak-pihak yang memiliki kedekatan sosial dengan KPM seperti RT maupun RW setempat. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan KDM yang menjelaskan bahwa:

“opdes kami memang dari Kesra yang memang ini memang staf dari kasi kesejahteraan dan untuk penerima nantinya yang kita apa kita saring ataupun yang kita masukkan di sistem itu tidak semata-mata hanya tunjuk tapi kita koordinasi dengan lembaga yaitu ketua RT ketua RW”

Adanya data yang tidak diperbarui secara berkala (*update*) membuat daftar KPM di Wilayah Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara tidak relevan dengan kondisi lapangan terbaru hal ini dikarenakan kurangnya keaktifan operator desa dalam melakukan pemutakhiran data secara mandiri. Salah satu informan KPM menyatakan bahwa:

“Ya setahu saya sejauh ini memang operator desa memang sudah memonitoring KPM-KPM yang ada di desa kami misal yang dulunya itu mendapat bantuan dan sekarang itu perkeekonomiannya sudah meningkat jadi bisa diverval ulang”

Informan ODR juga menyatakan bahwa:

“satu perangkat mewilayahi 2 RT sehingga akan lebih detail dan lebih pasti terkait dengan tingkat kesejahteraan warga disitu dan apabila perangkat masih belum jelas atau belum pasti perangkat akan menghubungi ketua RT selaku pemangku wilayah di RT masing-masing sehingga e sasarannya akan lebih tepat”

Terbatasnya fasilitas komputer di kantor desa merupakan kendala teknis yang signifikan, terutama dalam pemutakhiran DTSEN untuk penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran. Keterbatasan ini menghambat operator desa di Wilayah Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara dalam melakukan *updating* data lapangan secara berkala yang menyebabkan data tidak sinkron (*exclude*) atau bantuan menjadi tidak merata. Hal ini dikarenakan komputer/laptop yang diberikan sudah tidak memenuhi spesifikasi dalam penggunaan SIKS-NG yang saat ini. Sesuai dengan pernyataan informan KDB yang mengemukakan bahwa:

“laptop atau itu nembe error atau lemot sering karena saking banyaknya apa itu kegiatan kegiatan yang diupload jadi memberi kemampuan apa itu nggeh RAM nya kurang gede atau gimana”

Selain itu rendahnya pemberian kompensasi kepada operator desa sesuai dengan pernyataan informan PDR yang mengemukakan bahwa:

“kemungkinan sudah dianggarkan untuk honor sektor ini ada sedikit dana mungkin tidak banyak sebagai apresiasi desa” dan informan PDK yang mengemukakan bahwa “kita support dengan insentiflah yang mana tidak besar tetapi sedikit banyak itu yang bisa kami berikan tambahan semangat kepada opdes”

Faktor eksternal dalam penyaluran bantuan sosial di Wilayah Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara yang pertama berkaitan dengan ketidakakuratan data (DTSEN) dan rendahnya kualitas pelayanan, yang sering kali berakar pada minimnya kapasitas aparatur dan tekanan sosial. Warga kadang memberikan informasi yang tidak akurat atau menyembunyikan status ekonominya (tidak jujur). Hal ini sesuai dengan pernyataan informan OPB yang mengemukakan bahwa:

“ketika ada bantuan dia selalu menggap dia miskin la itu ya mindset kita yang harus rubah ketika ada bantuan soal ketenaga kerjaan apa soal itu UMKM dia selalu ngaku punya usaha ya seperti itulah”

Ketidaksesuaian data kependudukan (NIK tidak sinkron dengan Dukcapil) dapat menjadi penyebab utama kegagalan penyaluran karena sistem akan otomatis menolak calon KPM yang NIK-nya tidak ditemukan atau tidak aktif di Dukcapil. Selain itu adanya perbedaan antara kondisi riil di lapangan dengan *By Name By Address* (BNBA) yang merupakan dokumen berisi daftar nama dan alamat penerima manfaat. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan ODR yang mengemukakan bahwa:

“terkait BNBA itu kami dapat file atau dapat BNBA berupa manifest yang dikirim oleh TKSK kecamatan setelah itu kami cetak terus kami verifikasi KPM nama-nama KPM dengan perangkat yang mewilayahi”

BNBA yang diperoleh operator desa di Wilayah Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara didasarkan pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) atau sistem lain yang belum diperbarui, sementara kondisi ekonomi warga sudah

berubah berupa KPM sudah mampu akan tetapi KPM masih masuk dalam kategori desil 1 sampai 4. Menyikapi hal tersebut informan PDK menjelaskan bahwa:

“menurut kami pandangan kami itu sudah layak nggeh secara anu secara kita buat berita acara untuk pengalihan atau pemberhentian tersebut salah satunya juga pernah kita laksanakan dengan musyawarah desa”

Bantuan sosial berpotensi diterima oleh KPM yang sudah tidak berhak (mampu) atau justru orang yang berhak tidak terdaftar yang memicu protes atau ketidakpuasan warga kepada pemerintah daerah. Adanya aturan yang sering berubah-ubah dari tingkat pusat ke daerah menyebabkan kebingungan operator desa di Wilayah Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara. DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) adalah versi terbaru yang menggantikan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) sejak awal 2025 sebagai acuan utama bantuan sosial di Indonesia. DTSEN lebih komprehensif, mencakup seluruh penduduk (tidak hanya miskin), dan terintegrasi dari data Regsosek, P3KE, dan DTKS lama agar penyaluran bansos lebih akurat, dinamis, terintegrasi, dan diperbarui secara berkala sesuai kondisi riil lapangan. Selain itu adanya intervensi atau intimidasi dari oknum tertentu yang memaksa memasukkan nama seseorang ke dalam DTSEN.

#### **4. Strategi Peningkatan Kinerja Operator Desa Dalam Penyaluran Bantuan Sosial**

Strategi peningkatan kinerja operator desa dalam penyaluran bantuan sosial di Wilayah Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara sangat diperlukan untuk menjamin ketepatan sasaran, waktu, dan jumlah bantuan sosial kepada KPM. Kinerja operator desa dalam penyaluran bantuan sosial di Wilayah Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara sebagai pilar utama bansos sangat bergantung pada kombinasi integritas SDM. Strategi utama dalam peningkatan kinerja operator desa dalam penyaluran bantuan sosial di Wilayah Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara yaitu pelatihan berbasis teknologi (SIKS-NG) yang disertai pengawasan ketat untuk menjamin data tepat sasaran, sehingga operator desa dapat bekerja lebih profesional, data lebih valid, dan penyaluran bansos lebih tepat sasaran. Supervisi berkala yang dilakukan dari pihak Kecamatan Kalinyamatan dan Dinas Sosial Kabupaten Jepara melakukan supervisi berkala terhadap kinerja operator desa untuk menemukan kendala teknis lebih awal dan melakukan profiling data secara rutin untuk memastikan tidak ada data ganda atau data yang tidak sesuai misalnya orang meninggal masih menerima bantuan.

Kompetensi operator desa dalam penyaluran bantuan sosial di Wilayah Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara adalah kunci efektivitas penyaluran bansos. Kelemahan utama kinerja operator desa dalam penyaluran bantuan sosial di Wilayah Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara pada beban kerja ganda karena operator desa sering kali merangkap tugas sebagai perangkat desa, sementara kekuatan kedekatan sosial operator desa di Wilayah Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara harus diimbangi dengan objektivitas dalam menentukan KPM yang layak menerima bantuan sosial agar terhindar dari konflik sosial.

Strategi peningkatan kinerja operator desa dalam penyaluran bantuan sosial di Wilayah Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara yaitu dengan memperbaiki kelemahan fasilitas (internet/komputer) dengan melakukan update perangkat secara berkala baik dari segi hardware maupun software menggunakan peluang bantuan pemerintah daerah maupun bantuan dari kementerian sosial agar kinerja operator desa dalam penyaluran bansos menjadi lebih tepat, cepat, dan transparan. Operator desa dalam penyaluran bantuan sosial di Wilayah Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara memiliki peran krusial namun rentan. Kekuatan kinerja operator desa dalam penyaluran bantuan sosial di Wilayah Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara pada akses data lapangan (basis data) sering terhambat oleh kelemahan teknis dan tingginya potensi data ganda (ancaman). Oleh karena itu strategi kunci kinerja operator desa dalam penyaluran bantuan sosial di Wilayah Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara agar tepat sasaran terletak pada kejujuran dan kecepatan operator dalam memperbarui data KPM melalui aplikasi SIKS-NG berdasarkan hasil Musdes.

Peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM dapat meningkatkan kinerja operator desa dalam penyaluran bantuan sosial di Wilayah Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara melalui pelatihan intensif aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) secara berkala agar operator mahir dalam pemutakhiran data. Pemerintah desa juga bisa melakukan pelatihan operator desa dalam profiling data, pembersihan data (menghapus data ganda), dan validasi data secara real-time dan melakukan pembaruan pengetahuan mengenai kriteria penerima bansos sesuai pedoman Kementerian Sosial.

Operator desa di Wilayah Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara juga dapat mendorong peralihan dari metode manual ke digital untuk efisiensi dengan memanfaatkan aplikasi Cek Bansos untuk transparansi dan mempermudah warga melaporkan atau mengecek status bantuan. Memastikan setiap desa memiliki perangkat dan operator yang aktif menggunakan SIKS-NG untuk mempercepat pemutakhiran data yang akurat. Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi juga diperlukan dalam peningkatan kinerja operator desa dalam penyaluran bantuan sosial di Wilayah Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara dengan melakukan pemisahan tugas (*job description*) untuk menghindari operator desa merangkap terlalu banyak jabatan perangkat desa lain, agar fokus pada tugas pokok dan fungsi (Tupoksi). Disisi lain juga menguatkan koordinasi dengan TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) dengan mengefektifkan pendampingan oleh TKSK dalam memverifikasi data sebelum diunggah ke tingkat pusat.

Rapat klarifikasi juga diperlukan dalam meningkatkan transparansi kinerja operator desa dalam penyaluran bantuan sosial di Wilayah Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan tokoh masyarakat baik RT dan RW dalam Musyawarah Desa (Musdes) untuk verifikasi data, guna meminimalisir tuduhan ketidaktepatan sasaran. Selain itu dengan memberikan honoratau insentif yang layak dan sesuai dengan beban kerja operator desa sebagai pengelola data sensitif dan memberikan apresiasi (*reward*)

kepada operator desa yang berhasil memperbarui data dengan tingkat akurasi tinggi dan cepat. Dengan menerapkan strategi di atas, diharapkan operator desa mampu menjadi ujung tombak yang profesional, responsif, dan berintegritas, sehingga penyaluran bansos menjadi tepat sasaran.

## **5. Hasil Temuan Lapangan**

Hasil temuan lapangan terkait dengan kinerja operator desa dalam penyaluran bantuan sosial di Wilayah Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara yaitu penunjukkan operator desa di Wilayah Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara masih belum independen dan beberapa desa terdapat perangkat desa yang merangkap jabatan sebagai operator desa. Hal ini mengakibatkan adanya beban kerja ganda dalam mengurus administrasi desa, keuangan desa dan sekaligus penyaluran bantuan sosial, sehingga fokus operator desa terbagi dan penyaluran menjadi tidak maksimal. Fenomena ini juga mengakibatkan fokus perangkat desa terpecah antara fungsi administratif dan teknis, berpotensi menurunkan efisiensi. Operator desa dalam proses penyaluran bantuan membutuhkan fokus tinggi pada aplikasi SIKS-NG. Jika operator desa dirangkap perangkat desa yang juga mengurus administrasi umum, maka pelayanan publik sesuai tugas pokok dan fungsi jabatannya tidak akan berjalan sebagaimana mestinya.

Penelitian ini juga menemukan bahwa sering terjadi ketidaksesuaian data penerima bantuan sosial di Wilayah Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara karena terdapat data ganda, warga meninggal, atau pindah yang tidak langsung diperbarui. Adanya Satu Nomor Induk Kependudukan (NIK) terdaftar di beberapa program bantuan misal PKH dan BPNT mengakibatkan inefisiensi anggaran. NIK atau data Kartu Keluarga (KK) yang tidak mutakhir menyebabkan sistem Kemensos tidak dapat memverifikasi penerima, sehingga bantuan tidak dapat dicairkan ke rekening atau KKS. Sistem terintegrasi Kemensos saat ini secara otomatis melakukan evaluasi, di mana data yang tidak diperbarui misalnya tidak aktif dapat memicu penghapusan otomatis dari daftar penerima (keluar dari sistem). Akurasi data yang rendah membuat tujuan utama bansos untuk mengurangi angka kemiskinan tidak tercapai secara optimal, bahkan bisa memperlambat pemulihan ekonomi masyarakat rentan.

Adanya pengakuan yang tidak jujur dari masyarakat agar dapat menerima bantuan sosial di Wilayah Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara. Hal ini juga dapat menumbuhkan mentalitas ingin miskin atau mentalitas tidak jujur demi mendapatkan keuntungan instan, daripada berusaha memperbaiki kondisi ekonomi. Bantuan yang seharusnya diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru dinikmati oleh orang yang mampu, menciptakan ketidakadilan sosial. Ketidajujuran ini dapat menghambat penanggulangan kemiskinan dan justru memperburuk kondisi sosial di masyarakat serta dapat memicu kecemburuan sosial dan konflik antarpenduduk di tingkat desa/kelurahan. Selain itu dengan adanya masalah tersebut dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah, karena data yang disajikan di lapangan tidak sesuai dengan realita.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan:

1. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa dan aturan teknis yang berlaku, tugas pokok dan fungsi operator desa di wilayah Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara dalam penyaluran bantuan sosial difokuskan pada pengelolaan data agar tepat sasaran. Tugas pokok dan fungsinya operator desa di wilayah Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara berfokus pada pengelolaan data kependudukan dan sosial melalui aplikasi SIKS-NG agar bantuan tepat sasaran, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Proses input data bantuan sosial kepada KPM di wilayah Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara dilakukan secara berjenjang melalui sistem terpadu SIKS-NG yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Tahapan sebelum input warga miskin dapat mengusulkan diri atau diusulkan oleh RT/RW ke Balai Desa dan melakukan musyawarah untuk memverifikasi kelayakan warga yang diusulkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Kepala Desa. Kemudian operator desa melakukan penginputan untuk memilih jenis bansos (PKH/BPNT) dan menetapkan status anggota keluarga. Data yang sudah diinput operator desa akan diverifikasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Jepara untuk mendapatkan pengesahan (validasi) dan data diteruskan ke Kementerian Sosial untuk penetapan akhir.
3. Posisi kinerja operator desa (IFAS) dalam penyaluran bantuan sosial di wilayah Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara menggunakan analisis SWOT dapat mengoptimalkan efisiensi, validitas data, dan ketepatan sasaran bantuan sosial. Operator desa di wilayah Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara memiliki kekuatan dalam mengenal langsung kondisi sosial ekonomi warganya, memudahkan verifikasi lapangan. Akan tetapi memiliki kelemahan berupa proses update baik proses verifikasi maupun proses validasi data terpadu DTSEN di tingkat desa belum berjalan optimal. Peluang yang diterima operator desa di wilayah Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara yaitu adanya bantuan dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam pemutakhiran data. Akan tetapi ancaman dari segi regulasi terkait kriteria penerima bantuan sering berubah, menuntut operator desa di wilayah Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara untuk dapat beradaptasi dengan cepat.
4. Strategi peningkatan kinerja operator desa di wilayah Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara difokuskan pada penguatan kapasitas teknis, pemutakhiran data, serta peningkatan transparansi. Operator desa, khususnya pengelola SIKS-NG karena operator desa merupakan ujung tombak dalam memastikan bansos tepat sasaran dan akuntabel. Strategi ini dapat berupa pelatihan khusus mengenai teknik pengumpulan data, analisis kualitas data, dan pembersihan data untuk memperbaiki data yang tidak akurat atau ganda. Pemangkasan prosedur administrasi yang berbelit-belit dalam proses pengusulan dan

penyaluran bansos untuk efisiensi waktu. Melakukan evaluasi kinerja operator desa di wilayah Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara secara berkala oleh Pemerintah Desa, Kecamatan dan Dinas Sosial untuk memberikan umpan balik dan memperbaiki kelemahan serta meningkatkan koordinasi dengan pendamping sosial tingkat kecamatan Kalinyamatan untuk mempercepat verifikasi data.

## **Saran**

Berdasarkan dinamika penyaluran bantuan sosial di wilayah Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara terkait isu pemutakhiran data, maka agenda penelitian mendatang diharapkan penelitian mendatang menfokuskan pada efektivitas pelatihan IT khusus bagi operator desa dan punjukkan kompetensi operator desa untuk mengurangi kesenjangan digital dan mempercepat administrasi penyaluran bantuan sosial.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Alma, & Priansa. (2019). *Analisis SWOT (Edisi 1)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Amma, G. M., Bagus, N., Suprojo, A. (2024). Implementasi Kebijakan BLT di Desa Sidomulyo Kota Batu Berdasarkan Analisis Van Meter dan Van Horn. *LENVARI: Jurnal of Social Science*. 2 (1): 1-7.
- Anggitaningsih, R., Anggraini, N. N., Karimah, N. (2024). Analisis Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Jember Dalam Proses Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun Anggaran 2023 Kepada Pemerintah Desa. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*. 2 (2): 198-202.
- Antasalam, A., Syamsuri., Purnama, S. (2024). Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Jelu Air Kecamatan Jawai Selatan. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*. 13 (3): 605-614.
- Caesar, S. (2024). Evaluasi Program Pengendalian Kemiskinan Di Kota Langsa Provinsi Aceh. *Jurnal Adminitrasi Pemerintah Daerah*. 3 (1): 1-11.
- Enny, M. (2019). *Manajemen Sumber Daya Pegawai*. Surabaya: Ubhara Manajemen Press.
- Khumaidi., & Zahro, L. (2024). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kelurahan Sukorejokecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*. 4 (12): 1-10.
- Lasari, D., & Ali, H. (2024). Strategi Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTSEN) Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Pada Dinas Sosial Kabupaten Agam. *Jurnal Mirai Management*. 9 (1): 12-22.
- Marchania, A. D., & Prabawati, I. (2024). Evaluasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Pada Komponen Pendidikan Di Desa Sidorejo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Publika Manajemen Publik*. 12 (2): 451-464.
- Mujito. (2023). *Manajemen Strategik Dengan Pendekatan Analisis SWOT*. Wawasan Ilmu, Banyumas.

- Pahlevi, C., & Musa, M. I. (2023). *Manajemen Strategi*. Makassar: Penerbit Intelektual Karya Nusantara.
- Prasetya, D. A. (2023). *Teknik Analisis SWOT Panduan Praktis Mengubah Tantangan Menjadi Peluang Untuk Strategi Bisnis Anda*. Anak Hebat Indonesia, Yogyakarta.
- Putra, K. R. (2024). Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Jurnal Adminitrasi Pemerintah Daerah*. 3 (1): 1-15.
- Rahmadhani, S., & Purnomo, D. (2024). Analisis Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Dalam Pengurangan Kemiskinan Di Kelurahan Pelem Kabupaten Wonogiri. *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ilmu Ekonomi (JASMIEN)*. 4 (3): 142-151.
- Rahman, S., Rachman, E., Gobel, L.V. (2024). Efektivitas Proses Penyaluran Program BPNT Di Desa Datahu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*. 4 (1); 1387-1395.
- Rangkuti, & Freddy. (2016). *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rizki, D. E. (2024). Analisis Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Desa Sukaraja Kulon Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka. *JUMASH (Jurnal Mahasiswa Sosial Humaniora)*. 1 (1): 38-55.
- Sabrina, L., Faqih, A., Ayuadela, C. (2024). Analisis Persepsi Masyarakat tentang Program BLT di Kelurahan Bobosan, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)*. 5 (1): 306-317.
- Salim, A. M., & Siswanto, A. B. (2019). *Analisis SWOT dengan Metode Kuesioner*. CV Pilar Nusantara: Semarang.
- Salsabila, N., Muna, N., Pradana, V. H. (2024). Analisis Efektivitas Bantuan Sosial (Bansos) dalam mengatasi Kemiskinan di Indonesia. *Journal of Macroeconomics and Social Development*. 1 (4): 1-13.
- Sitorus, P. N., Rosselvelt, F. A., Pardosi, S. R. (2024). Evaluasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana (BLT) Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Lestari Dadi, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Berdagai. *Jurnal Riset Ilmiah*. 1 (3): 201-209.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarsid., Asti, E. G., Pangestuti, R.S., & Tartiani, Y. A. T. (2023). *Manajemen Strategi: Pendekatan secara Teori dan Kajian Kasus*. Bogor: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Tripomo. (2017). *Analisis Membedah Kasus SWOT*. Bandung: Mizan Media Utama.
- Tujuwale, S. D., Warongan, J. D., Pangerapan, S. (2024). Analisis pengelolaan bantuan langsung tunai di Desa Sendangan dan Desa Talikuran Kecamatan Tompaso. *Riset Akuntansi dan Manajemen Pragmatis*. 2 (1): 52-62.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Wijayanti, H. (2019). *Panduan Analisis SWOT untuk Kesuksesan Bisnis*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.

# *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*

Vol 8 No 4 (2026) 2218 - 2236 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351

DOI: 10.47467/alkharaj.v8i4.11691

Wiswasta, I. G. N. A., Agung, I. G. A. A., Tamba, I. M. (2018). *Analisis SWOT (Kajian Perencanaan Model, Strategi dan Pengembangan Usaha)*. Denpasar: Universitas Mahasaraswati Press.